

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri perbankan mengalami kemajuan pesat di masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru menerbitkan Paket Kebijakan Moneter pada tanggal 27 Oktober 1988 dan lebih dikenal dengan nama “*Pakto 88*”. Pakto 88 menghapus aturan yang menyulitkan pendirian suatu bank, sehingga dengan pakto ini memberi angin segar bagi Industri perbankan di Indonesia dan menjadi titik balik perbankan nasional. Tujuan utama kebijakan ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui fungsi bank sebagai lembaga mediasi dalam pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit.

Menurut Latumerissa (2012) bahwa latar belakang kebijaksanaan “Pakto 88” dilandasi oleh kebijaksanaan 1 Juni 1983 yang ternyata mendapat penghimpunan dana untuk investasi swasta. Selanjutnya pihak swasta diharapkan berpartisipasi lebih besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan iklim yang memungkinkan bank-bank beroperasi lebih efisien dan perluasan jaringan kantor bank. Kebijaksanaan ini meliputi pengerahan dana masyarakat melalui kemudahan pembukaan kantor cabang; pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR); penerbitan sertifikat deposito dan perluasan bentuk tabungan; peningkatan ekspor nonmigas dengan pendirian bank devisa; pendirian bank campuran dalam bentuk PT (Perseroan Terbatas); pembukaan kantor cabang pembantu bank asing dan

perdagangan valas; peningkatan efisiensi perbankan dan lembaga keuangan melalui kebijakan penempatan dana BUMN dan BUMD pada bank swasta nasional serta penetapan batas maksimum perkreditan (*legal lending limit*); peningkatan kemampuan pengendalian moneter dengan penurunan cadangan wajib minimum (*reserve requirement=RR*) dari 15% menjadi 2%; dan menciptakan iklim pengembangan pasar modal dengan menetapkan pajak atas bunga deposito, sertifikat deposito, dan tabungan sehingga masyarakat tertarik akan keberadaan pasar modal.

Salah satu ketentuan fundamental dalam Pakto 88 adalah pendirian bank umum swasta nasional dipermudah, cukup dengan modal disetor minimum Rp 10 miliar dan pendirian bank perkreditan rakyat (BPR) hanya dengan modal disetor minimum sebesar Rp 50 juta. Jumlah bank mencapai 111 bank di tahun 1987 dan meningkat signifikan menjadi 240 bank pada tahun 1995 (Bank Indonesia, 2004).

Tabel 1.1 berikut ini merupakan jumlah bank-bank dan jumlah kantor yang dikutip dari data Statistik Perbankan Indonesia - OJK periode tahun 2006 s/d 2011.

Tabel 1.1
Jumlah Bank di Indonesia beserta Jumlah Kantor

| unit dalam satuan | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Jumlah Bank | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bank Umum | 130 | 130 | 124 | 121 | 122 | 110 |
| Bank Perkreditan Rakyat | 1,880 | 1,817 | 1,772 | 1,733 | 1,706 | 1,681 |
| Jumlah Kantor | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bank Umum | 9,110 | 9,680 | 10,868 | 12,837 | 13,837 | 14,332 |
| Bank Perkreditan Rakyat | 3,173 | 3,250 | 3,367 | 3,644 | 3,910 | 4,050 |

Sumber : www.ojk.go.id

Pertumbuhan jumlah bank menjadikan jumlah asset mengalami peningkatan sebagaimana tujuan penerbitan Pakto 88 bahwa bank diharapkan dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi. Tabel 1.2 dibawah ini menunjukkan pertumbuhan aset bank, penyaluran dana (kredit) dan simpanan pihak ketiga periode tahun 2006 s/d 2011.

Tabel 1.2
Pertumbuhan Aset Perbankan

| unit dalam miliar rupiah | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Jumlah Aset | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bank Umum | 1,693,850 | 1,986,501 | 2,310,557 | 2,534,106 | 3,008,853 | 3,235,261 |
| Bank Perkreditan Rakyat | 23,045 | 27,741 | 32,533 | 37,554 | 45,742 | 50,382 |

Sumber : www.ojk.go.id

Salah satu fungsi perbankan adalah menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman (kredit), tabel 1.3 dibawah ini menunjukkan penyaluran pinjaman oleh perbankan periode 2006 s/d 2011.

Tabel 1.3
Penyaluran Pinjaman Perbankan

| unit dalam miliar rupiah | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Penyaluran Dana | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bank Umum | 1,380,373 | 1,702,520 | 2,015,221 | 2,282,179 | 2,765,912 | 3,001,905 |
| Bank Perkreditan Rakyat | 21,904 | 26,549 | 31,313 | 36,076 | 43,877 | 48,278 |

Sumber : www.ojk.go.id

Sedangkan sumber dana dari penyaluran kredit sebagian besar adalah simpanan dari pihak ketiga (tabungan, deposit, lainnya) dari masyarakat. Tabel 1.4 dibawah ini menunjukkan simpanan pihak ketiga periode 2006 s/d 2011.

Tabel 1.4
Simpanan Pihak Ketiga Perbankan

| unit dalam miliar rupiah | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sumber Dana | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Bank Umum | 1,468,369 | 1,718,965 | 1,990,345 | 2,180,934 | 2,563,562 | 2,720,801 |
| Bank Perkreditan Rakyat | 18,733 | 22,629 | 26,345 | 30,367 | 37,034 | 40,938 |

Sumber : www.ojk.go.id

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, bahwa “ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi bank merupakan lembaga mediasi antara penyimpan dana dan peminjam dana. Manajemen bank diharuskan memaksimalkan pengelolaan asset bank yang sebagian besar merupakan simpanan dari pihak ketiga, untuk selanjutnya menyalurkan ke dalam bentuk pinjaman. Pinjaman atau lebih dikenal kredit merupakan transaksi utama bank dan sebagian besar pendapatan bank berasal dari transaksi kredit. Semakin besar penyaluran kredit ke masyarakat (ritel ataupun perusahaan), menunjukkan salah satu indikator bahwa bank tersebut mempunyai daya saing yang kuat di pasar. Dalam tulisan ini besaran pinjaman dijadikan sebagai indikator dalam menguasai persaingan di pasar, upaya untuk meningkatkan asset bank.

Menurut pasal 1 butir (11) UU No. 10 Tahun 1998, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kredit merupakan produk utama bank, yang memberikan kontribusi utama dalam pendapatan usaha bank. Sehingga pengelolaan kredit merupakan faktor penting

dalam pengelolaan bisnis bank. Meningkatnya jumlah bank menjadikan tingkat persaingan semakin ketat dan salah satu sisi positifnya menciptakan inovasi produk kredit. Disisi lain bank menjadi lebih agresif menyalurkan kredit dan produk lainnya untuk memenangkan persaingan. Beberapa contoh inovasi produk kredit saat ini antara lain dalam bentuk KPR (Kredit Kepemilikan Rumah), KPA (Kredit Pemilikan Apartemen), KKB (Kredit Kepemilikan Bermotor), KTA (Kredit Tanpa Agunan) dan lain sebagainya.

Di sisi lain dampak dari penyaluran kredit yang terlalu agresif akan menimbulkan sisi negatif pada bank khususnya jika pengelolaan dan pemantauan kredit tidak maksimal. Pemberian kredit yang tidak melalui proses analisa kredit mendalam serta antisipasi risiko yang rendah akan menjadikan kredit dalam masalah dikemudian hari. Kredit-kredit yang bermasalah ini akan memberikan dampak besar kesehatan bank menjadi menurun dan selanjutnya terhadap kesinambungan bisnis bank. Kredit-kredit yang bermasalah tersebut disebut juga dengan istilah *Non-Performing Loan*.

Sejarah mencatat proses likuidasi 16 (enam belas) bank pada 1 November 1997 sebagai akibat krisis moneter dan berdampak besar terhadap penutupan bank-bank tersebut, tidak bisa dilepaskan dari tingkat kesehatan bank yang mengalami penurunan. Krisis global di tahun 2008 yang lebih dikenal dengan “*Sub-prime Mortgage*” dimulai dari pemberian kredit yang agresif pada sektor perumahan dan pengelolaan yang tidak baik. Krisis tersebut berawal dari kredit perumahan (*mortgage*) di Amerika Serikat dimana pemberian kredit kepada debitur yang belum

memiliki kredibilitas baik dan dikategorikan berisiko tinggi. Kenaikan volume kredit kategori bermasalah merupakan faktor utama yang menjadikan perekonomian global menjadi guncang di tahun 2008.

Beberapa tahun belakangan *trend* kenaikan kredit bermasalah terjadi di Indonesia, dan hal ini berkaitan lesunya pasar global sehingga banyak produk-produk yang tidak terserap pasar. Sebagian besar industri perbankan di Indonesia mengalami kenaikan rasio *Non-Performing Loan*, dan salah satu latar belakang dalam penulisan ini adalah untuk melakukan penelitian atas faktor-faktor yang mempengaruhi rasio *Non-Performing Loan*.

Non-Performing Loan menjadi salah satu alat (*tool*) untuk menilai tingkat kesehatan bank, terutama dari sisi manajemen perkreditan. *Non-Performing Loan* akan selalu melekat pada fungsi perbankan dalam menyalurkan kredit ke masyarakat. Semakin rendah nilai *Non-Performing Loan* maka semakin kecil risiko kredit (gagal bayar), dan sebaliknya apabila *Non-Performing Loan* tinggi maka risiko gagal bayar akan meningkat. Besaran nilai *Non-Performing Loan* diperoleh dari total nilai pinjaman yang memiliki kualitas aktiva (kolektibilitas) kategori peringkat 3 (kurang lancar) sampai dengan kategori peringkat 5 (macet) dibagi dengan total pinjaman. Bank Indonesia menetapkan bahwa bank memiliki peringkat sehat untuk kategori *Non-Performing Loan gross* tidak melebihi 5%.

Menurut Taswan (2010) bahwa faktor-faktor penyebab kredit macet dipengaruhi oleh ;

- 1) Faktor Internal

- a. Kurang tajamnya analisa kredit.

Pada tahap analisa kredit ini bank seharusnya mampu mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan usaha calon debitur dengan kata lain harus mengetahui isi perut calon debitur, sehingga dapat menyimpulkan dengan tepat apakah usahanya layak dibiayai atau tidak.

- b. Sistem pengawasan dan administrasi kredit.

Tidak dimilikinya sistem pengawasan dan administrasi kredit yang tertib menyebabkan manajemen tidak dapat memantau penggunaan kredit dan perkembangan usahanya, sehingga manajemen tidak dapat melakukan tindakan-tindakan koreksi dengan segera bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan, misalnya agunan yang tidak diikat dengan sempurna.

2) Faktor Eksternal

- a. Faktor persaingan yang ketat.

Debitur kurang mampu menghadapi persaingan karena kualitas barang yang dihasilkan buruk, harga kurang bersaing, distribusinya buruk, promosinya tidak tepat sasaran dan lain-lain

- b. Keadaan perekonomian yang tidak mendukung perkembangan usaha debitur, misalnya krisis ekonomi di Amerika membuat ekspor melemah.

- c. Penggunaan kredit diluar obyek pembiayaan.

Ini sering terjadi pada debitur yang tidak hati-hati, misalnya kredit untuk usaha digunakan untuk pembelian mobil pribadi.

Penelitian mengenai penyebab terjadinya kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*) telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain sebagai berikut :

- 1) Rajiv dan Dhal (2003) dalam penelitian di perbankan India menyatakan bahwa salah satu variabel independen *Loan Deposit Ratio* berpengaruh negatif terhadap *Non-Performing Loan*.
- 2) Ahmed (2006) dalam penelitiannya di bank komersial di Bangladesh menyatakan bahwa salah satu variabel independen *Gross Domestic Product* berpengaruh positif terhadap *Non-Performing Loan*.
- 3) Misra dan Dhal (2010) menyatakan bahwa variabel independen *Gross Domestic Product* dan *Credit Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap *Gross Non-Performing Loan*.
- 4) Greenidge dan Grosvenor (2010) dalam penelitiannya di Barbados menyatakan bahwa variabel independen Inflasi berpengaruh positif, sedangkan *Gross Domestic Product* berpengaruh negatif terhadap *Non-Performing Loan*.
- 5) Diyanti (2012) dalam penelitiannya atas studi kasus bank umum konvensional yang menyediakan kredit untuk kepemilikan rumah (KPR) di Indonesia menyatakan bahwa variabel independen *Bank Size*, *Capital Adequacy Ratio*,

Gross Domestic Product dan Inflasi berpengaruh signifikan, sedangkan *Loan Deposit Ratio* berpengaruh tidak signifikan terhadap *Non- Performing Loan*.

- 6) Alexandri dan Santoso (2015) melakukan penelitian terhadap Bank Pembangunan Daerah di Indonesia dengan hasil penelitian bahwa variabel independen *Capital Adequacy Ratio* dan Inflasi berpengaruh tidak signifikan dengan regresi positif, sedangkan *Gross Domestic Product*, *Size* berpengaruh tidak signifikan dengan arah hubungan negatif dan ROA berpengaruh signifikan dengan arah hubungan positif terhadap *Non- Performing Loan*.

Atas beberapa penelitian diatas khususnya di Indonesia bahwa penelitian dilakukan terhadap Bank Pemerintah Daerah (BPD) dan Bank Umum Konvensional yang melayani Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), sehingga terdapat ruang (*gap*) untuk melakukan penelitian atas Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terutama periode 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian faktor dari internal maupun eksternal yang mempengaruhi *Non-Performing Loan* atas Bank Umum Konvensional yang telah melakukan pencatatan saham di BEI.

1.2 Rumusan Masalah

Persaingan bisnis perbankan terjadi tidak hanya bank antar bank, akan tetapi juga dengan industri keuangan lainnya diantaranya perusahaan *multi finance*

(*leasing*), jasa asuransi dan lainnya. Tingkat persaingan bank umum terjadi antara bank swasta nasional, bank milik pemerintah, bank asing serta bank campuran. Persaingan yang semakin ketat di industri keuangan akan berdampak dalam proses persetujuan kredit. Jika proses kredit tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan pemantauan kredit tidak maksimal, maka akan timbul persoalan kredit-kredit yang bermasalah atau dikenal *Non-Performing Loan*. Peningkatan nilai *Non-Performing Loan* dapat disebabkan faktor internal bank maupun eksternal bank.

Penulisan tugas akhir ini dalam rangka meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi *Non-Performing Loan* baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

- a) Faktor Internal meliputi :
 - *Loan Funding Ratio (LFR)*
 - *Capital Adequacy Ratio (CAR)*
- b) Faktor Eksternal meliputi :
 - Inflasi
 - *Gross Domestic Product (GDP)* atau Pertumbuhan Ekonomi

Penyaluran kredit memberikan konsekuensi terhadap pengembalian (pembayaran) dari nasabah, bisa lancar dan tepat waktu ataupun sebaliknya. Kualitas kredit dari nasabah akan berbeda, dimana pengawas bank dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengelompokkan menjadi 5 (lima) pemeringkatan.

Kategori kualitas kredit dalam kelompok *Non-Performing Loan* adalah kredit yang memiliki kecenderungan gagal bayar dan dikelompokkan menjadi kredit dengan peringkat kurang lancar (rating 3), diragukan (peringkat 4) dan macet (peringkat 5). Sebagai salah satu komponen penting dalam pengelolaan sebuah bank, maka besaran *Non-Performing Loan* menjadi salah satu indikator baik pihak internal maupun eksternal (investor).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulisan ini mempunyai tujuan, antara lain sebagai berikut :

- a) Apakah *Loan Funding Ratio* berpengaruh terhadap *Non-Performing Loan* pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016?
- b) Apakah *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap *Non-Performing Loan* pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016?
- c) Apakah inflasi berpengaruh terhadap *Non-Performing Loan* pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016?
- d) Apakah pertumbuhan ekonomi atau *Gross Domestic Product* terhadap *Non-Performing Loan* pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui pengaruh *Loan Funding Ratio* terhadap *Non-Performing Loan* pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016.
- b) Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Non-Performing Loan* pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016.
- c) Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap *Non-Performing Loan* pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016.
- d) Untuk mengetahui pengaruh *Gross Domestic Product* terhadap *Non-Performing Loan* pada Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap :

1) Bank

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan kepada bank umum dalam menjalankan fungsi mediasi, terutama dalam proses penyaluran kredit yang sehat.

2) Nasabah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan kepada nasabah bank, sehingga nasabah mempunyai referensi dan bahan pertimbangan untuk memilih bank yang tepat untuk menyimpan dana.

3) Otoritas Pengawas

Otoritas Pengawas khususnya perbankan mendapatkan gambaran awal, sehingga diharapkan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk penyelamatan bank yang sedang mengalami kesulitan dalam hal perkreditan.

4) Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi dasar dan acuan untuk penelitian selanjutnya (*future research*), serta memberikan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.

